

**PELAKSANAAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS
MASYARAKAT DI DESA LUBUK MAYAN KECAMATAN RANTAU PANDAN
KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI**

Oleh:

Nurhidayati Amelia

Email : ameliamukti77@gmail.com

Pembimbing : Dr. H. Zaili Rusli SD, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Implementation of supplying water and sanitation based society program is a program and government's real action (center and region) for increasing society's health degree especially in decreasing diarrhea disease rate and other disease which transmitted through water and environment. Lubuk Mayan Village till now is not available supplying clean water system, where the condition supplying water system which ever exist by other program which from Rantau Duku Village now has not distributed again to Lubuk Mayan Village ofte

The theory concept that used is empowerment. For analyzing implementation of supplying water and sanitation based society program, researcher used theory of Delivery. The researcher used qualitative research with descriptive method. In collecting data, researcher used key informant as information source and triangulation technique as source in validity test.

The result of research shows that implementation of supplying water and sanitation based society program in Lubuk Mayan village have proceed suitable with regulation and plan that exist. In implementation of supplying water and sanitation based society program are enthusiastic to contribute in empowerment process.

Key Words : Implementation, Water and sanitation, Public Empowerment

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen sangat kuat untuk mencapai *Millenium Development Goals (MDGs)*, yaitu menurunnya jumlah penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar sebesar 50 %

pada tahun 2015. Pemerintah juga melalui draft Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan bahwa pada 2019 Indonesia bisa mencapai 100% akses (*Universal Access*). Artinya, sampai akhir tahun tersebut setiap

masyarakat Indonesia baik yang tinggal di perkotaan maupun kawasan perdesaan sudah memiliki akses terhadap sumber air minum aman dan fasilitas sanitasi layak.

Pencapaian *Universal*

Access tersebut adalah 85% penduduk Indonesia mendapatkan layanan air minum yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu sebesar 60 liter/orang/hari dan 15% penduduk mendapatkan layanan yang memenuhi kebutuhan pokok minimal untuk makan dan minum (*lifeline consumption*) yaitu sebesar 15 liter/orang/hari. Sedangkan pencapaian *Universal Access* di sektor sanitasi menargetkan 85% penduduk Indonesia mendapatkan layanan sanitasi yang memenuhi SPM yaitu pada sektor air limbah sebanyak 85% penduduk mendapatkan akses terhadap fasilitas sanitasi dasar *on-site* yang memadai.

Pemerintah Provinsi Jambi melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, dalam pasal 6 yaitu Pedoman Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat berfungsi sebagai dasar dan pedoman bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan (swasta, LSM, Organisasi Masyarakat Setempat, dan pihak lain) dalam menyelenggarakan dan menjalankan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Jambi. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, maka partisipasi mereka juga menjadi inti dari setiap upaya/program pembangunan. Tanpa partisipasi masyarakat itu sendiri dalam upaya menolong diri mereka sendiri, maka program apapun akan sulit berhasil memberdayakan mereka.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 10 ayat 1 tentang Program dan bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan

masyarakat. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia, untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan. Telah disinggung pula dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 bahwa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan.

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat (perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin, dan lain-lain) dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (*demand responsive approach*). Kedua pendekatan tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat termasuk di lingkungan sekolah.

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan pinggiran kota (peri-urban) yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan,

meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target *Universal Access* 2019 melalui pengarusutamaan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

Tujuan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) tersebut di atas akan tercapai bila sasaran program sebagaimana diuraikan dalam indikator kinerja kunci (*Key Performance Indicator*) Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) tercapai apabila:

- 1) Terdapat tambahan 5,6 juta penduduk yang dapat mengakses sarana air minum aman dan berkelanjutan.
- 2) Terdapat tambahan 4 juta penduduk yang dapat mengakses sarana sanitasi yang layak dan berkelanjutan.
- 3) Minimal 50% masyarakat dusun (lokasi Program) menerapkan Stop Buang Air Sembarangan (BABS).
- 4) Minimal 60% masyarakat mengadopsi program Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS).
- 5) Pemerintah kabupaten/kota memiliki dokumen perencanaan daerah bidang air minum dan sanitasi untuk mendukung adopsi dan pengarusutamaan Pendekatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan pencapaian target pembangunan air minum dan sanitasi daerah.
- 6) Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi yang telah dibangun serta perluasan program air minum

dan sanitasi untuk mencapai target *Universal Access* 2019.

Desa Lubuk Mayan di Kecamatan Rantau Pandan merupakan salah satu desa di Kabupaten Bungo yang mendapatkan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (PAMSIMAS) karena masyarakat Desa Lubuk Mayan sampai saat ini belum ada sistem penyediaan air minum yang layak, dimana kondisi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang pernah ada oleh program lain yang ada dari Desa Rantau Duku sekarang sudah tidak disalurkan lagi ke Desa Lubuk Mayan dan hanya sebagian kecil penduduk menggunakan sumur gali, sedangkan sisanya masih memanfaatkan aliran sungai dan air tadah hujan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, sementara aliran air sungai yang dimanfaatkan warga sudah terkontaminasi oleh kotoran hewan dan kotoran manusia sehingga penduduk Desa Lubuk Mayan sering menderita penyakit muntaber, diare dan gatal-gatal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Lubuk Mayan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Lubuk Mayan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

Konsep Teori

Konsep teori sangat diperlukan didalam melaksanakan penelitian, tanpa adanya rumusan teori maka hasil penelitian tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan. Konsep teori yang relevan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah alternatif pembangunan

yang harus berbasis pada masyarakat (*community based development*), artinya pembangunan berawal dari masyarakat dikelola oleh masyarakat, dan dimanfaatkan untuk masyarakat. Pemberdayaan dipahami sangat berbeda menurut cara pandang orang maupun konteks kelembagaan, politik dan sosial budayanya.

Ada yang memahami pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Pemberdayaan juga menyatakan partisipasi yang lebih besar dalam proses pembangunan.

Menurut Priyono dan Pranarka dalam Sulistiyani (2004:78) pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang atau yang belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Pendekatan utama yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek/ program pembangunan, dalam hal ini khususnya proyek/ program pembangunan desa, akan tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunan itu sendiri.

Pemberdayaan sendiri oleh Suharto (2005:155) adalah sebuah proses, yang dengan proses itu individu maupun komunitas memperoleh penguasaan dan kontrol atas hidup mereka sendiri dan partisipasi demokratis dalam kehidupan masyarakat mereka. Berdasarkan skema itu,

pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosio politik dan kompetensi partisipatif.

Menurut catatan Ife dalam bukunya Huda (2009:272) disebutkan bahwa pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan (*power*) dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged*). "*Empowerment aims to increase the power of the disadvantaged*" tulis Ife. Berdasarkan pernyataan ini, pemberdayaan pada dasarnya menyangkut dua kata kunci, yakni kekuasaan dan kekurangberuntungan.

- a. Kekuasaan, realitas yang terjadi di masyarakat, antara satu kelompok dengan kelompok masyarakat yang lain sering terjadi kompetisi yang tidak menguntungkan, kelompok masyarakat yang kaya cenderung mempunyai kekuasaan absolut. Elit politik yang menguasai jalannya pemerintahan menciptakan relasi yang tidak seimbang, sehingga pemberdayaan harus mampu membuka dan mendorong akses yang terbuka agar tidak terjadi dominasi.
- b. Kekurangberuntungan, lemahnya kekuatan yang dimiliki salah satu kelompok masyarakat menyebabkan mereka menjadi kurang beruntung. Sehingga pemberdayaan diharapkan mampu menangani masyarakat yang kurang beruntung akibat dari faktor struktural, kultural dan personal.

Hakikat pemberdayaan ialah mendorong kekuatan masyarakat untuk membuka akses yang seluas-luasnya agar tidak terjadi monopoli dan dominasi

kekuasaan, sehingga kelompok masyarakat mampu memanfaatkan potensi maupun sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian.

Pemberdayaan harus dilakukan secara terus menerus, komprehensif, dan simultan sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan semua segmen yang diperintah. Menurut Ndraha (2003:132), diperlukan berbagai program pemberdayaan, diantaranya:

- a. Pemberdayaan politik, yang bertujuan meningkatkan daya tawar (*bargaining position*) yang diperintah terhadap pemerintah. *Bargaining* ini dimaksudkan agar yang diperintah mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian tanpa merugikan pihak lain. Utomo menyatakan bahwa birokrasi yang berdaya dan tangguh adalah yang memiliki kualitas kehidupan kerja (*quality of work life*) yang tinggi dan berorientasi kepada, (1) partisipasi dalam pengambilan keputusan (*participation in decision making*), (2) program pengembangan karir (*career development program*), (3) gaya kepemimpinan (*leadership style*), (4) derajat tekanan yang dialami oleh karyawan (*the degrees of stress experienced by employees*) dan (5) budaya organisasi (*the culture of the organization*).
- b. Pemberdayaan ekonomi, diperuntukkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen agar dapat berfungsi sebagai penanggung dari dampak negatif pertumbuhan, pembayar resiko salah urus, pemikul beban pembangunan, kegagalan

program, dan akibat kerusakan lingkungan.

- c. Pemberdayaan sosial-budaya, bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui *human investment* guna meningkatkan nilai manusia (*human dignity*), penggunaan (*human utilization*) dan perlakuan yang adil terhadap manusia.
- d. Pemberdayaan lingkungan, dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, agar pihak yang diperintah dan lingkungannya mampu beradaptasi secara kondusif dan saling menguntungkan.

Menurut Ife (2008:63) ada 3 strategi yg diterapkan untuk Pemberdayaan Masyarakat:

- 1) Perencanaan dan kebijakan (*policy and planning*)

Untuk mengembangkan perubahan struktur dan institusi sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai sumber kehidupan utk meningkatkan taraf kehidupannya. Perencanaan dan kebijakan yang berpihak dapat dirancang untuk menyediakan sumber kehidupan yg cukup bagi masy utk mencapai keberdayaan. Misalnya: kebijakan membuka peluang kerja yg luas, Upah Minimum Regional (UMR) yg tinggi (*poverty* dan pengangguran).

- 2) Aksi sosial dan politik (sosial dan *political action*)

Diartikan agar sistem politik yg tertutup diubah sehingga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem politik. Adanya keterlibatan masyarakat secara politik membuka

peluang dalam memperoleh kondisi keberdayaan.

3) Peningkatan kesadaran dan pendidikan

Masyarakat /kelompok masyarakat tertentu seringkali tidak menyadari penindasan yang terjadi pada dirinya. Kondisi ketertindasan diperparah dengan tidak adanya skill untuk bertahan hidup secara ekonomi dan sosial. Untuk masalah ini peningkatan kesadaran dan pendidikan untuk diterapkan. Contoh : memberi pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana struktur-struktur penindasan terjadi, memberi sarana dan *skill* agar mencapai perubahan secara efektif.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha yang memungkinkan suatu kelompok atau masyarakat mampu bertahan (*survive*) dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dalam rangka mencapai tujuan bersama. dalam kerangka pemikiran ini, upaya memberdayakan masyarakat dapat dilakukan melalui 3 (tiga) dimensi, yakni :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. titik tolak dari pemikiran ini adalah pemahaman bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. pemberdayaan dalam konteks ini diartikan sebagai upaya untuk membangun potensi itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh masyarakat serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*),

sehingga diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyesiaan berbagai masukan serta pembukaan berbagai akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya dalam memanfaatkan peluang.

3. Melindungi, yakni dalam proses pemberdayaan harus dapat dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah.

Dimensi diatas sejalan dengan pemikiran Pranarka dan Moeljarto dalam Priyono dan Pranarka (1996:57) yang menempatkan manusia atau masyarakat sebagai subyek (pelaku) sehingga memunculkan makna : pertama, proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. proses ini dapat pula dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian masyarakat melalui organisasi. kecenderungan dalam proses itu dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Kedua, proses pemberdayaan menekankan pada upaya untuk menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menemukan apa yang menjadi pilihan hidupnya, melalui proses dialog, sehingga kecenderungan ini dapat dipahami sebagai kecenderungan yang bersifat sekunder.

Pemberdayaan ditujukan agar klien/sasaran mampu meningkatkan kualitas kehidupannya untuk berdaya, memiliki daya saing, dan mandiri. Dalam melaksanakan pemberdayaan khususnya kepada masyarakat, agen pemberdayaan perlu

memegang prinsip-prinsip pemberdayaan. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan sehingga pemberdayaan dapat dilakukan secara benar. Mengacu pada hakikat dan konsep pemberdayaan, maka dapat diidentifikasi beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berdaya. Setiap individu juga memiliki kebutuhan, masalah, bakat, minat dan potensi yang berbeda. Unsur-unsur pemaksaan melalui berbagai cara perlu dihindari karena bukan menunjukkan ciri dari pemberdayaan.
- b. Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi klien/sasaran. Hakikatnya, setiap manusia memiliki kebutuhan dan potensi dalam dirinya. Proses pemberdayaan dimulai dengan menumbuhkan kesadaran kepada sasaran akan potensi dan kebutuhannya yang dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk mandiri. Proses pemberdayaan juga dituntut berorientasi kepada kebutuhan dan potensi yang dimiliki sasaran. Biasanya pada masyarakat pedesaan yang masih tertutup, aspek kebutuhan, masalah dan potensi tidak nampak. Agen pemberdayaan perlu menggali secara tepat dan akurat. Dalam hal ini agen pemberdayaan perlu memiliki potensi untuk memahami potensi dan kebutuhan klien/sasaran.
- c. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu sasaran menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan

tujuan, pendekatan dan bentuk aktivitas pemberdayaan.

- d. Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat. Budaya dan kearifan lokal seperti sifat gotong royong, kerjasama, hormat kepada yang lebih tua dan kearifan lokal lainnya sebagai jati diri masyarakat perlu ditumbuhkembangkan melalui berbagai bentuk pemberdayaan sebagai modal sosial dalam pembangunan.
- e. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu, sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Tahapan ini dilakukan secara logis dari yang sifatnya sederhana menuju yang kompleks.
- f. Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap dan berkesinambungan. Kesabaran dan kehati-hatian dari agen pemberdayaan perlu dilakukan terutama dalam menghadapi keragaman karakter, kebiasaan dan budaya masyarakat yang sudah tertanam lama.
- g. Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari salah satu aspek saja, tetapi perlu dilakukan secara holistik terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.
- h. Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan.
- i. Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebiasaan

untuk terus belajar, belajar sepanjang hayat (*lifelong learning/education*). Individu dan masyarakat perlu dibiasakan belajar menggunakan berbagai sumber yang tersedia. Sumber belajar tersebut bisa: pesan, orang (termasuk masyarakat di sekitarnya), bahan, alat, teknik, dan juga lingkungan di sekitar tempat mereka tinggal. Pemberdayaan juga perlu diarahkan untuk menggunakan prinsip belajar sambil bekerja (*learning by doing*).

- j. Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keragaman budaya. Oleh karena itu diperlukan berbagai metode dan pendekatan pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
- k. Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya. Partisipasi ini mulai dari tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, termasuk partisipasi dalam menikmati hasil dari aktivitas pemberdayaan.
- l. Klien/sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian. Jiwa kewirausahaan tersebut, mulai dari: mau berinovasi, berani mengambil resiko terhadap perubahan, mencari dan memanfaatkan peluang, serta mengembangkan networking sebagai kemampuan yang diperlukan dalam era globalisasi.
- m. Agen pemberdayaan atau petugas yang melaksanakan pemberdayaan perlu memiliki kemampuan (kompetensi) yang cukup, dinamis, fleksibel dalam bertindak, serta dapat mengikuti perkembangan zaman dan

tuntutan masyarakat. Agen pemberdayaan ini lebih berperan sebagai fasilitator.

- n. Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat, mulai dari unsur pemerintah, tokoh, guru, kader, ulama, pengusaha, LSM, relawan dan anggota masyarakat lainnya. Semua pihak tersebut dilibatkan sesuai peran, potensi dan kemampuannya.

Tentang hal ini, Delivery dalam Mardikanto (2004:125) menawarkan tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Secara rinci masing-masing tahap tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap 1. Seleksi Lokasi,
- 2) Tahap 2. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat,
- 3) Tahap 3. Proses pemberdayaan masyarakat,
 - a) Kajian keadaan pedesaan partisipatif,
 - b) Pengembangan kelompok,
 - c) Penyusunan rencana dan pelaksana kegiatan,
 - d) Monitoring dan evaluasi partisipatif,
- 4) Tahap 4. Pemandirian masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif untuk pengolahan data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dan pengamatan di lapangan. Semua informasi yang dikumpulkan dipelajari sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh.

Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Penelitian ini dilakukan di Desa Lubuk Mayan Kabupaten Bungo, fokus penelitian ini adalah pada Pemberdayaan Masyarakat dalam program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Lubuk Mayan Kabupaten Bungo. Hal ini berdasarkan pertimbangan karena pelaksanaan program Desa Lubuk Mayan merupakan satu-satunya desa yang setelah diselesaikannya program ini dapat diresmikan oleh Bupati Kabupaten Bungo secara langsung dan pelaksanaan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Lubuk Mayan dapat dikatakan selesai dengan tepat waktu dibanding desa lainnya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dimana peneliti memilih informan dan informan yang peneliti anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian. Sebagai informan yang paling mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam Program Pamsimas di desa Lubuk Mayan adalah Konsultan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Adapun yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah Fasilitator Masyarakat Pemberdayaan

Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari *key informan* yang merupakan sumber informasi utama dalam memperoleh jawaban dari permasalahan ini. Adapun yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini mengenai penguatan kelembagaan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) adalah Tim Fasilitator Masyarakat

(TFM) dan koordinator Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM).

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapat, seperti laporan-laporan, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, hasil-hasil penelitian lainnya, buku-buku yang dapat mendukung dan menjelaskan masalah.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi adalah usaha untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan dengan objek penelitian guna mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian. Tujuan observasi adalah untuk mengecek dan memastikan sendiri sampai dimana kebenaran data dan informasi yang telah dikumpulkan.

b. Wawancara

Riduwan (2012:4), wawancara adalah pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung kepada informan yang berhubungan dengan penelitian untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan, membaca dan mempelajari berbagai macam bentuk data tertulis baik yang berupa Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Desa Lubuk Mayan, laporan akhir Desa Lubuk Mayan serta data-data lain di perpustakaan yang dapat dijadikan bahan analisa untuk penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang telah didokumentasikan dalam buku.

Untuk lebih meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap data penelitian ini, penulis melakukan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Penulis mengambil teknik triangulasi ini dengan sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori menurut Delivery dalam Mardikanto (2004:125).

Setelah melakukan kajian analisa berdasarkan temuan-temuan dan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan, dengan ini dapat disimpulkan bahwa :

Pelaksanaan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di desa Lubuk Mayan telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Masyarakat yang merupakan sebagai pelaku utama dalam program ini baik laki-laki, perempuan, miskin dan kaya turut serta ambil bagian dan berperan aktif dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan program ditambah dengan berbagai pelatihan yang dilakukan secara bertahap membuat perilaku masyarakat setempat menjadi berubah kearah yang lebih baik. Setelah terlaksananya program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) masyarakat Desa Lubuk Mayan yang dianggap telah mampu mengelola sendiri kegiatannya secara mandiri tidak akan didampingi Tim Fasilitator secara langsung lagi, kemudian tanggung jawab diserahkan sepenuhnya kepada Badan Pengelola Sistem

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) yang sewaktu-waktu apabila terjadi masalah yang sulit teratasi oleh anggota badan ini dapat untuk menghubungi fasilitator untuk melakukan pengecekan kembali ke desa Lubuk Mayan.

Keberhasilan pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dapat dilihat dari terlaksananya pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, dalam pasal 6 yaitu Pedoman Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat berfungsi sebagai dasar dan pedoman bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan (swasta, LSM, Organisasi Masyarakat Setempat, dan pihak lain) dalam menyelenggarakan dan menjalankan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Jambi. Tujuan dan sasaran dari peraturan itu sendiri akan memberikan dampak positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Dari hasil beberapa pemaparan diatas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat sudah berjalan dengan baik.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi mempengaruhi Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Desa Lubuk Mayan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

Orientasi pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi desa/kelurahan. Proses pemberdayaan dimulai dengan menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat desa sasaran akan potensi dan kebutuhannya yang dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk menjadi mandiri. Biasanya pada masyarakat

pedesaan yang masih tertutup, aspek kebutuhan, masalah dan potensi tidak terlalu tampak.

Budaya gotong royong yang sangat melekat pada masyarakat di desa Lubuk Mayan, yang merupakan salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia sendiri. Masyarakat terlibat secara aktif dalam seluruh kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan termasuk besaran dana kontribusi masyarakat minimal 20% dari kebutuhan biaya Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) yaitu berupa *in cash* sebesar 4% maupun *in kind* sebesar 16% dari keseluruhan dana.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya air dan sanitasi, mengingat masih banyaknya masyarakat Desa Lubuk Mayan yang kesulitan dalam memperoleh air bersih dan keinginan untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat sehingga jumlah masyarakat yang menderita muntaber, diare dan gatal-gatal berkurang.

PENUTUP

Setelah melakukan kajian analisa berdasarkan temuan-temuan dan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan, dengan ini dapat disimpulkan bahwa :

Pelaksanaan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di desa Lubuk Mayan telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada.

Setelah penulis melakukan penelitian dalam pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, maka penulis akan memberikan saran untuk mengevaluasi dari hasil pelaksanaan sebagai berikut :

- A. Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan

Sanitasi (BPSPAMS) Desa Lubuk Mayan agar dapat melakukan inovasi terhadap pengelolaan program sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan juga meminimalisir keluhan yang bisa terjadi pada masyarakat Desa Lubuk Mayan.

- B. Masyarakat Desa Lubuk Mayan agar dapat meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terutama dalam kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang harus dihilangkan dan selanjutnya membudayakan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) agar berkurangnya jumlah masyarakat yang menderita penyakit muntaber, diare dan gatal-gatal juga semakin meningkatnya kesadaran warga untuk memiliki jamban di rumahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahmat. 2008. *Efektivitas Organisasi Edisi Pertama*. Jakarta: Airlangga.

Anwas, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta.

Hidayat. 2010. *Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Huda, Miftachul. 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ife, Jim dan Frank Tesoriero. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Moeleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kronologi: Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Direksi Cipta.

Prijono, Onny S dan A. M. W Pranarka. 1996. *Pemberdayaan :Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.

Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Steers, Richard M. 2008. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Wrihatnolo, Randy R dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.

Karya Ilmiah:

Lingga, Irna Sri. (2010). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (WSLIC-2) di Jorong Salibawan Kenagarian Sundatar Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Skripsi Sarjana pada FISIP UNRI Pekanbaru: tidak dipublikasikan.

Internet:

<http://fikhbosua.blogspot.co.id/2012/03/teori-dan-teknik-pemberdayaan.html>
(diakses pada Jum'at, 30 Oktober 2015 pukul 20:00 WIB)

Dokumen-Dokumen :

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat.

Pedoman Umum Pengelolaan Program Pamsimas.

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pamsimas Di Tingkat Masyarakat.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pamsimas Tingkat Masyarakat.